

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEMITRAAN  
MULTIPIHAK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA  
MARGAGIRI KECAMATAN BOJONEGARA KABUPATEN SERANG**

Akhmad Fakhri<sup>1</sup>, Herlina Siregar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Pendidikan Non Formal FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
[12221220009@untirta.ac.id](mailto:12221220009@untirta.ac.id), [herlina.siregar@untirta.ac.id](mailto:herlina.siregar@untirta.ac.id)

**ABSTRACT**

*Waste management is currently a problem in every region of Indonesia, including the village of Margagiri in Bojonegara Subdistrict, Serang Regency, Banten Province. This is due to a lack of proper waste management. To address this issue, a company in the vicinity of the village—PT PLN Indonesia Power UBP Cilegon, has launched a community empowerment program with one of its focuses on waste management. In carrying out these empowerment activities, PT PLN Indonesia Power UBP Cilegon does not operate alone but collaborates with multi-stakeholder partners. Therefore, the objective of this study is to provide an overview of how community empowerment strategies based on multi-stakeholder partnerships are implemented. The research methodology employed a descriptive qualitative approach. The results of this study indicate that the multi-stakeholder empowerment strategy consists of the initiation, formation, implementation, evaluation, and development stages. The partnership has been successful due to the active involvement of various actors and the achievement of partnership success indicators.*

*Keywords: Community empowerment, Empowerment strategies, Multi-stakeholder partnerships*

## **ABSTRAK**

Pengelolaan sampah saat ini menjadi permasalahan setiap daerah di Indonesia, salah satunya di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Provinsi Banten. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengelolaan sampah yang baik. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, sebuah perusahaan di sekitar desa yakni PT PLN Indonesia Power UBP Cilegon meluncurkan sebuah program pemberdayaan masyarakat dengan salah satu fokusnya terhadap pengelolaan sampah. Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan, PT PLN Indonesia Power UBP Cilegon tentu tidak berjalan tidak sendiri, akan tetapi menggandeng mitra multipihak. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan multipihak. Metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan multipihak terdiri dari tahap inisiasi, pembentukan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan. Hasil kemitraannya berjalan dengan baik karena keterlibatan peran dari berbagai aktor serta tercapainya indikator keberhasilan kemitraan.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan masyarakat, Strategi pemberdayaan, Kemitraan multipihak

### **A. Pendahuluan**

Pengelolaan sampah saat ini menjadi permasalahan setiap daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Produksi sampah di Kabupaten Serang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang tahun 2025, produksi sampah harian mencapai 1.191 ton per harinya. Penyebab dari permasalahan ini adalah kurangnya pengelolaan sampah yang baik, tercatat bahwa di Provinsi Banten sendiri pengelolaan sampahnya hanya

mencapai 13%. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang. Dari permasalahan tersebut, mengakibatkan Desa Margagiri sering kali mengalami banjir, tanah yang tercemar, dan penumpukan sampah. Salah satu faktor pemicu permasalahan tersebut adalah ditutupnya akses pembuangan sampah dari Kabupaten Serang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cilowong di Kota Serang dan TPA Bagendung di Kota Cilegon. Selain

itu, perilaku masyarakat Desa Margagiri yang kerap kali membuang sampah sembarangan turut menjadi faktor permasalahan. Kondisi ini menyebabkan sampah di wilayah Kabupaten Serang, termasuk di Desa Margagiri, semakin menumpuk dan sulit untuk ditangani secara mandiri oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.

Pada dasarnya pengelolaan sampah yang baik merupakan tanggung jawab setiap individu. Namun, apabila masyarakat masih mengalami kesulitan dalam melaksanakannya, maka diperlukan adanya pendampingan atau pembinaan. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai persoalan sampah serta mampu mengelolanya secara tepat (Hasibuan & Syafarudin, 2021). Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilakukan secara mandiri, tetapi memerlukan kerja sama dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pemerintah,

sektor swasta, dunia usaha, hingga masyarakat itu sendiri. Kemitraan yang luas dan kolaboratif akan membuka akses yang lebih besar terhadap sumber daya, informasi, serta dukungan yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan. Melalui jaringan kemitraan, masyarakat dapat memperoleh dukungan teknis, pendanaan, pelatihan, serta berbagai bentuk bantuan lainnya (Pakpahan, et al., 2024).

Dari permasalahan diatas, membuat sebuah perusahaan yakni, PT PLN Indonesia Power UBP Cilegon yang beroperasi di sekitar wilayah Desa Margagiri meluncurkan sebuah program yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Dalam proses pelaksanaan pemberdayaan tersebut, PT PLN Indonesia Power UBP Cilegon berjalan dengan kemitraan multipihak.

Menurut Bahagijo et al. (2019) mengemukakan bahwa kemitraan multipihak merupakan bentuk kerja sama yang berlandaskan pada kesepakatan

sukarela, saling membutuhkan, kebersamaan, serta partisipasi aktif melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai institusi, seperti pemerintah, sektor bisnis, masyarakat sipil, LSM (NGO), dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan langsung terkait isu yang menjadi fokus kerja sama.

Dalam penelitian Rochaeni et al. (2022) yang menyebutkan bahwa kemitraan dalam pengembangan pariwisata di Bandung Barat belum berjalan secara optimal dikarenakan masih adanya ketidakpercayaan antar aktor. Hal yang sama juga terungkap dalam penelitian Rahu & Suprayitno (2021) pada program pengembangan desa wisata di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya terdapat sebuah permasalahan dalam bermitra yaitu, kurangnya komunikasi antar mitra sehingga kemitraan yang dilakukan belum berjalan optimal. Berbagai penelitian di atas telah berhasil memetakan hambatan teknis dan komunikasi dalam kemitraan, namun masih terdapat keterbatasan dalam merumuskan strategi atau solusi yang konkret terkait masalah tersebut. Oleh

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana strategi dirancang dan diimplementasikan melalui kemitraan multipihak dalam menjawab permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Margagiri.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sujarweni dalam Purnia et al. (2020) dalam metode deskriptif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji keadaan atau status sekelompok individu, suatu objek, seperangkat kondisi, sistem pemikiran, maupun kategori peristiwa pada waktu tertentu, khususnya masa kini.

Sehingga pada penelitian ini akan mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai fenomena atau kejadian sesuai dengan data yang ada mengenai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemitraan Multipihak Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Penelitian ini direncanakan selama kurang lebih 5 bulan, yaitu dari bulan Agustus s/d Desember 2025 diawali dengan perencanaan, pelaksanaan observasi dan penyusunan laporan penelitian.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Strategi**

Hasil kemitraan menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan multipihak dalam program pengelolaan sampah di Desa Margagiri dijalankan dengan berbagai tahapan, yaitu:

##### **a. Inisiasi**

Strategi yang pertama yaitu inisiasi. Menurut Brown dalam Aruan & Irwantoro, (2020) tahap inisiasi mencakup beberapa kegiatan, yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan berbagai alternatif solusi atas masalah tersebut, serta memberikan rekomendasi mengenai solusi yang paling tepat. Inisiasi dilakukan dengan pertemuan langsung, yang kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan untuk bermitra.

##### **b. Pembentukan**

Strategi berikutnya adalah pembentukan dilaksanakan dengan

kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*). Dari hasil FGD tersebut disepakati bahwa dibentuk sebuah payung program bernama KAMI BERSEMI (Kampung Inovatif, Bersih, Sejahtera, dan Mandiri). Hal ini selaras dengan hasil penelitian Sulistiarini et al., (2024) yang mengemukakan bahwa FGD merupakan sebuah model komunikasi dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat yang hasilnya dapat digunakan untuk merumuskan sebuah program pemberdayaan masyarakat. Terdapat juga pemetaan *stake holder* yang menghasilkan bahwa dalam program ini terdapat 5 unsur *stake holder* yang terdiri dari perusahaan, pemerintah, masyarakat, akademisi, dan media massa. Terdapat aktor utama diantaranya yaitu, berasal dari sektor pemerintah adalah pemerintah Desa Margagiri, perusahaan berasal dari PT PLN Indonesia Power UBP Cilegon, Masyarakat yang berasal dari kelompok TPST Desa Margagiri. Selain itu terdapat aktor pendukung yang berasal dari akademisi dan media massa. Akademisi berasal dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sedangkan media massa berasal dari kantor berita Inews.

##### **c. Pelaksanaan**

Setelah seluruh program dan rencana kegiatan disepakati bersama, kemitraan memasuki tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, aktivitas kemitraan dijalankan secara kolaboratif dengan koordinasi serta komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, perusahaan, akademisi, serta pihak pendukung lainnya. Menurut Sulfikar et al. (2025) keberhasilan pelaksanaan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh adanya interaksi yang berkelanjutan antar aktor, proses koordinasi, serta komitmen bersama dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Temuan penelitian menjelaskan bahwa hubungan kemitraan multipihak yang terbentuk belum sepenuhnya setara dan cenderung mengarah pada bentuk kemitraan semu (*pseudo partnership*) karena dalam pelaksanaan, akademisi dan media massa tidak terlibat dalam pengambilan keputusan serta tidak masuk dalam struktur kemitraan. Menurut Suryono & Nurani dalam Lionar et al., (2020) *pseudo partnership* atau kemitraan semu adalah kerja sama yang terjadi antara beberapa pihak namun tidak dilaksanakan secara seimbang, yang mana salah satu pihaknya tidak ikut

membuat keputusan, tidak terikat kesepakatan, bahkan tidak sadar terkait substansi yang sedang direncanakan.

#### d. Pemantauan

PT PLN Indonesia Power UBP Cilegon melakukan Evaluasi dan monitoring secara berkala selama 1 bulan sekali. Selain untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan rencana yang telah ditetapkan, monitoring dan evaluasi juga berfungsi untuk mengetahui sejauh mana program tersebut telah mencapai atau mendekati tingkat keberhasilan yang diharapkan, melihat hambatan atau kendala yang dialami oleh masyarakat, dan mendengarkan masukan dari masyarakat. Monitoring dan evaluasi sangat penting dilakukan untuk menjamin agar program CSR tetap berjalan secara optimal serta mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Jasrani et al., 2023).

#### e. Pengembangan

Tahap pengembangan merupakan bagian evaluasi secara menyeluruh secara komprehensif mencakup penilaian terhadap ketercapaian tujuan, hambatan yang muncul, serta perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yang hasilnya

akan dijadikan sebagai pengembangan. Menurut Santoso et al., (2019) menjelaskan bahwa SROI tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga menilai aspek yang lebih luas mencakup nilai sosial, ekonomi, serta dampak lingkungan yang dihasilkan dari suatu program. Sedangkan untuk mengukur tingkat keberlanjutan kemitraan, aktivitas, dan efektivitas kualitas hubungan kemitraan dapat dilakukan dengan metode *stakeholder engagement*. Hal ini sejalan dengan pendapat Chaerunisa & Siregar, (2023) yang menyebutkan bahwa *Stakeholder Engagement* dapat digunakan untuk mengelola keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan.

## **2. Peran Stakeholders**

Peran pemerintah dalam hal ini pemerintah Desa Margagiri diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Desa, penerbitan Surat Keputusan (SK) pembentukan kelompok pengelola, serta pengintegrasian program ke dalam agenda pembangunan desa menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan fungsi regulatifnya. Menurut Ramdayanti et al., (2021) peran pemerintah sebagai regulator yaitu, menetapkan arah kebijakan

guna menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan peraturan sebagai pedoman dalam mengatur seluruh kegiatan pembangunan. Selain fungsi regulatif, pemerintah desa juga menjalankan fungsi fasilitatif dan koordinatif. Pemerintah desa berperan dalam mengoordinasikan kegiatan, mengingatkan masyarakat melalui forum RT dan musyawarah desa, serta menjalin komunikasi dengan mitra perusahaan Toruan et al., (2025) Pemerintah menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak perusahaan, yakni PT PLN Indonesia Power, serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan seperti pelatihan dan sosialisasi.

Perusahaan dalam hal ini adalah PT PLN Indonesia Power UBP Cilegon berperan sebagai *enabler* atau pihak pendukung pada faktor permodalan dengan memberikan dana, fasilitas seperti peralatan pengelolaan sampah, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan. Hal ini sejalan dengan Yunas, (2019) yang menyatakan bahwa perusahaan hadir sebagai pendukung dari segi modal, teknologi, dan membantu pembangunan masyarakat.

Selanjutnya masyarakat di Desa Margagiri menempati posisi sentral dalam kemitraan multipihak pengelolaan sampah rumah tangga. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pelaku utama yang menjalankan aktivitas operasional sehari-hari, mulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, penyetoran ke tempat pengolahan, hingga keterlibatan dalam kelompok pengelola TPST. Hal ini selaras dengan pendapat Setyawan et al., (2025) yang mengungkapkan bahwa peran masyarakat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan aktor pendukung yakni akademisi dan media massa, mereka berperan dalam transfer pengetahuan dan publikasi kegiatan. Akademisi sebagai agen yang menjembatani pengetahuan akademik dengan realitas lokal melalui proses pembelajaran bersama masyarakat. Transfer pengetahuan tersebut Menurut Arfani, (2024) dijelaskan bahwa pengetahuan tidak hanya ditransfer melalui edukasi formal, bisa juga melalui konsep pendidikan non formal yang memungkinkan sebagai penambah

pengetahuan di luar pendidikan formal. Sedangkan akademisi yakni kantor berita Inews berfungsi sebagai sarana publikasi, diseminasi informasi, serta penguat citra program melalui penyebaran informasi mengenai kegiatan, capaian, dan dampak program kepada masyarakat luas. Menurut Ritonga & Safitriani, (2024) media massa berperan sebagai agen penyebaran informasi yang mampu meningkatkan kesadaran sosial masyarakat. Selain itu, menurut Rogers dalam Mailin et al., (2022) mengungkapkan bahwa media memiliki fungsi penting dalam menyebarkan gagasan atau inovasi baru kepada masyarakat sehingga mendorong proses adopsi perilaku.

### **C. Hasil Kemitraan**

Menurut Ditjen P2L & PM dalam Nosa & Agung (2023) indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan kemitraan diantaranya yaitu *Input*, *Proses*, *Output*, dan *Outcome*.

Indikator *input* dapat diukur melalui beberapa aspek, antara lain terbentuknya wadah atau sekretariat pengurus yang dilandasi oleh kesepakatan bersama dalam kemitraan, tersedianya sumber dana atau biaya yang dialokasikan untuk

pengembangan kemitraan, serta adanya dokumen perencanaan yang disepakati oleh institusi-institusi yang terlibat. Dalam kemitraan multipihak pada program pengelolaan sampah di Desa Margagiri, indikator input dapat dikatakan berhasil, dibuktikan dengan terbentuknya wadah atau tim pengelola TPST yang memiliki legalitas formal, tersedianya sumber pendanaan untuk operasional program yang berasal dari perusahaan, serta adanya dokumen kesepakatan atau MoU antara PT PLN Indonesia Power.

Selanjutnya indikator proses yang mencakup penilaian kualitas pertemuan. Dari hasil penelitian, kualitas pertemuan dalam kemitraan ini dikatakan berhasil karena adanya pertemuan rutin dan kualitas komunikasi yang terjaga dengan baik. Rahmawati *et al.*, (2025) mengungkapkan bahwa keberhasilan kolaborasi antar aktor (pemerintah, swasta, dan masyarakat) sangat ditentukan oleh proses interaksi yang berlangsung secara berkelanjutan, khususnya melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen bersama, dan pemahaman bersama (*shared understanding*).

Selanjutnya dalam indikator *output* yang dinilai adalah jumlah kegiatan yang telah terealisasi dan turunnya permasalahan. Indikator keberhasilan kemitraan pada aspek *output* telah terpenuhi. Hal ini ditunjukkan o melalui realisasi program seperti pelatihan pemilahan sampah, sosialisasi kampanye kebersihan, studi banding terkait pengelolaan sampah, pembentukan bank sampah, pengembangan inovasi teknologi tepat guna pada TPST, pengembangan TPST sebagai *learning center* dan menurunkan permasalahan sampah yang ada dengan total pengelolaan mencapai 10 kubik per hari yang menunjukkan bahwa kemitraan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi menghasilkan capaian nyata yang dapat dirasakan secara langsung. Menurut Sururi *et al.*, (2022) pada dasarnya tujuan akhir dari pemberdayaan adalah keberlanjutan dari segi aspek pembelajaran nilai sosial.

Indikator terakhir adalah *outcome* yang menilai kemitraan dari aspek dampak kemitraan itu sendiri terhadap program dan keberlanjutan masyarakat. Hasil temuan penelitian juga menjelaskan bahwa program ini

dapat berjalan dengan adanya kemitraan multipihak, hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan sebuah program tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Suaib & Nain, (2023) yang mengemukakan bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan adanya kepedulian yang diwujudkan melalui kemitraan serta kebersamaan antara pihak yang telah berkembang dengan pihak yang masih tertinggal. Hal ini mencerminkan pentingnya kerja sama antara kelompok masyarakat yang lebih maju dengan kelompok yang belum berkembang agar tercipta proses pemberdayaan yang lebih merata. Dalam konteks berkelanjutan, adanya peningkatan dalam kemandirian masyarakat, hal ini dibuktikan dengan inisiatif masyarakat saat ini dalam menjalankan program tanpa harus digerakan oleh pemerintah desa ataupun perusahaan. Dengan demikian menurut Usman *et al.*, (2024) *outcome* tidak hanya diukur dari penurunan permasalahan, tetapi juga dari sejauh mana kemitraan mampu menghasilkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan.

#### **D. Kesimpulan**

Proses yang dilakukan Desa Margagiri dengan PT PLN Indonesia Power UBP Cilegon dalam menjalin kemitraan adalah adanya proses inisiasi, pembentukan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, serta pengembangan. Kemitraan yang terjalin atas kolaborasi multipihak dari berbagai sektor seperti Pemerintah Desa Margagiri, sektor perusahaan PT PLN Indonesia UBP Cilegon, Kelompok masyarakat pengelola TPST, akademisi yang berasal dari Universitas Sultan Ageng tirtayasa dan media massa yang berasal dari kantor berita Inews.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemitraan multipihak Kemitraan multipihak yang terbentuk bersifat *pseudo-partnership* atau kemitraan semu karena terdapat mitra yang berasal dari akademisi dan media massa tidak ikut membuat keputusan, tidak terikat kesepakatan, dan tidak termasuk ke dalam struktural kemitraan. Hasil kemitraan dikatakan berhasil dan berjalan dengan baik karena adanya kolaborasi dan sinergi dari kemitraan multipihak.

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam dinamika kekuasaan dan relasi antar aktor dalam kemitraan multipihak, khususnya dalam konteks *pseudo partnership*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arfani, M. (2024). Implikasi Pembelajaran Non Formal terhadap Peningkatan Pemahaman Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pendidikan. *Islamic Education Review*, 1(1), 38–59.
- Aruan, N., & Irwantoro. (2020). Implementasi Model Pengelolaan Hutan Rakyat dengan Pola Agroforestri Berbasis Kemitraan. *Develop: Jurnal Program Studi Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 23–52.
- Bahagijo, S., Santono, H., & Okitasar, M. (2019). *Panduan Kemitraan Multipihak untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Chaerunisa, A. B., & Siregar, S. V. (2023). Implementasi Stakeholder Engagement dalam Sustainable Development Studi Kasus Pada PT XYZ. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(4), 2956–2969.
- Hasibuan, R., & Syafarudin. (2021). *Problema Kesehatan dan Lingkungan Di Bumi Melayu*. Medan: CV Kreatif Merdeka Kreasi Group.
- Jasrani, Arafat, & Firdaus. (2023). Evaluasi Program Corporate Social Responsibility PT Gasing Sulawesi. *TOLIS ILMIAH: Jurnal Penelitian*, 5(1), 1–12.
- Lionar, E., Duadji, N., & Yulianti, D. (2020). Membangun Partnership Pengelolaan Layanan Informasi Publik (Studi Kerja Sama Dinas Kominfo Provinsi Lampung Dan Perum Lkbn Antara). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan, Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 113–128.
- Mailin, Rambe, G., Ar-Ridho, A., & Candra. (2022). Teori Media/Teori Difusi Inovasi. *Jurnal Guru Kita*, 6(2), 158–168.
- Nosa, M. W., & Agung, M. (2023). Peran Kemitraan PT Santy Abadi Mandiri Berdasarkan Indikator Keberhasilan Kemitraan (Studi Pada PT Santy Abadi Mandiri Dan Petani Talas Tanjung Bintang, Lampung). *Jurnal Kompetitif Bisnis Volume*, 1(13), 1410–1419.
- Purnia, D. S., Muhajir, H., Adiwisastra, M. F., & Supriadi, D. (2020). Pengukuran Kesenjangan Digital Menggunakan Metode Deskriptif Berbasis Website. *Evolusi: Jurnal Sains Dan Manajemen*, 8(2), 79–92.
- Rahmawati, S. A., Djumiarti, T., & Triyuningsih. (2025). Proses Collaborative Governance Dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 754–771, 13(3), 754–771.

- Rahu, P. D., & Suprayitno. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1), 13–24. <https://doi.org/10.37304/jispar.v10i1.2286>
- Ramdayanti, E., Argenti, G., & Marsingga, P. (2021). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) ISSN*, 6(02), 194–201.
- Ritonga, R. R., & Safitriani. (2024). Analisis Peran Media Sosial dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 754–770.
- Rochaeni, A., Yamardi, & Fujilestari, N. A. (2022). Model Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 124–134. <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.38>
- Santoso, B. M., Adinegara, R., Ismanto, S. U., Munajad, I., & Mulyono, H. (2019). Pengukuran Dampak Investasi Sosial Pelaksanaan CSR Menggunakan Metode Social Return of Investment (SROI). *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 153–167.
- Setyawan, A. A., Desembrianita, E., Santoso, M. H., Syahril, & Kalalo, R. R. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan V*, 4(1), 1494–1503.
- Suaib, & Nain, U. (2023). "Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Sulfikar, Mallapiseng, A., & Baso, S. (2025). Kolaborasi Aktor dalam Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Wulonggere, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(2), 2170–2180.
- Sulistiarini, E. B., Prihandini, R., Alfian, R., Shofiah, W., & Laili, H. (2024). Strategi Pembentukan Eduwisata Pertanian Ramah Lingkungan melalui Focus Group Discussion (FGD). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(4), 4465–4472.
- Sururi, A., Hasanah, B., & Dwianti, A. (2022). Efektivitas Implementasi Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam Mendukung Dampak Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publikd*, 17(2), 150–162.
- Toruan, R. R. M. L., Wiyati, E. K., & Meliala, Y. H. (2025). Komunikasi Pemangku Kepentingan melalui Koordinasi dalam Pengembangan Pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara. *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 14(1), 59–74.
- Usman, Wartoyo, Haida, N., &

Wahyuningsih, N. (2024). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman Volume, 11(1)*, 108–125.

Yunas, novy S. (2019). Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Inovasi Kebijakan, 3(1)*, 37–46.  
<https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46>